



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2019

Penyusun:

Penanggung Jawab: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Lampung,
Ketua Tim: Kepala Bidang PPA.II, Editor/Desain Grafis: Ander,
Anggota: Agus Ristanto, Edi, Eko Nugroho, Denny Jauhari, Prapti Lestari,
Herwendi, Siti Wahyuni, Ermatita

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
Provinsi Lampung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia-Nya penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Flash Report Triwulan I Tahun 2019 Provinsi Lampung dapat diselesaikan tepat waktu.

KFR adalah salah satu kajian yang disusun oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung yang diarahkan untuk memotret kondisi fiskal dan kebijakan fiskal di Provinsi Lampung. Hasil analisis yang tertuang dalam KFR menggambarkan potret fiskal secara ringkas yang dikaitkan dengan indikator makroekonomi pada periode kajian.

Perekonomian Provinsi Lampung semakin baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal I tahun 2019 sebesar 5,18 persen (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I tahun sebelumnya yaitu 5,09 persen. Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi motor utama didukung kenaikan pendapatan masyarakat dan inflasi yang terkendali. Aktivitas partai politik di awal tahun dalam rangka persiapan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif mendorong pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) dan berdampak positif terhadap sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Lampung.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat Lampung juga meningkat tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,96 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 tumbuh 1,13 persen namun belum dapat mengejar ketertinggalan dari IPM nasional.

Realisasi APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di triwulan I 2019 masih rendah, dimana realisasi pendapatan tercatat 11,91 persen. Adapun penyerapan APBN sebesar 21,41 persen termasuk transfer daerah dan dana desa. Dari sisi APBD, realisasi pendapatan sebesar Rp5,77 triliun dan realisasi belanja mencapai Rp3,07 triliun sehingga terjadi surplus Rp1,90 triliun. Realisasi pendapatan dalam APBD sampai akhir tahun 2019 diperkirakan akan mencapai Rp28,62 triliun dengan realisasi belanja Rp24,08 triliun. Sementara itu, pendapatan total konsolidasian turun 74,73 persen dengan kontribusi penurunan terbesar pada realisasi dana transfer dan pendapatan bukan pajak. Total belanja konsolidasian juga turun 21,48 persen dibanding kondisi triwulan I tahun 2018.

Kajian tematik mengangkat topik pembiayaan UMi untuk memajukan sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) di Lampung. UMK berperan penting bagi perekonomian Lampung



KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I TAHUN 2019

terutama karena 99,17 persen usaha non pertanian merupakan usaha jenis ini. Saat ini terdapat 770 ribu UMK di Provinsi Lampung dan telah menyerap 1,67 juta tenaga kerja. Kendala utama yang dihadapi pelaku UMK adalah sulitnya akses permodalan untuk mengembangkan usaha. Untuk itu pemerintah menggulirkan skema pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk memfasilitasi akses permodalan bagi UMK dengan plafon maksimal Rp10 juta. Antusiasme pelaku UMK di Lampung untuk mengajukan pembiayaan UMi cukup besar ditunjukkan dengan realisasi akad terus meningkat dari Januari hingga Mei 2019 mencapai lebih dari Rp32 Milyar. Diharapkan kemudahan pembiayaan UMI dapat menambah jumlah UMK di Lampung dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Lampung yang saat ini masih sebesar 1,92 persen.

Akhirnya kami berharap agar kajian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 15 Mei 2019

Kepala Kantor,

Alfiker Siringoringo †



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	1
B. Inflasi.....	4
C. Indikator Kesejahteraan.....	5
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....	7
A. Pendapatan Negara.....	7
B. Belanja Negara.....	10
C. Prognosis Realisasi APBN.....	11
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....	12
A. Pendapatan Daerah.....	13
B. Belanja Daerah.....	15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2019.....	16
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD).....	17
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	17
B. Pendapatan Konsolidasian.....	17
C. Belanja Konsolidasian.....	19
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional.....	21
V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	22
A. Skema Pembiayaan Ultra Mikro untuk memajukan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Provinsi Lampung.....	22



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (yoy), 2017-2019.....	2
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (q-to-q), 2017-2019.....	3
Grafik 1.3.	Inflasi Bulanan Bandar Lampung, Metro, Gabungan, dan Nasional, Januari-maret 2019.....	4
Grafik 1.4.	TPT Lampung dan Nasional, 2016-2019.....	5
Grafik 1.5.	IPM Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018.....	6
Grafik 2.1.	Perkembangan Pajak Penjualan (PPH) Triwulan I Lingkup Provinsi Lampung (dalam miliar), 2015-2019.....	8
Grafik 2.2.	Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai Triwulan I lingkup Provinsi Lampung (dalam miliar), 2015-2019.....	8
Graik 2.3.	Perkembangan Pendapatan Cukai Triwulan I Lingkup Provinsi Lampung (juta rupiah).....	9
Grafik 2.4.	Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial di Provinsi Lampung (dalam miliar), 2019.....	10
Grafik 2.5.	Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Lampung, 2019.....	10
Grafik 3.1.	Realisasi PAD Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2019 dan 2018.....	13
Grafik 3.2.	Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2019 dan 2018.....	14
Grafik 3.3.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2019 dan 2018.....	14
Grafik 3.4.	Realisasi Belanja Pegawai, Barang & Jasa dan Modal Per Kabupaten/Kota, Triwulan I Tahun 2019.....	15
Grafik 4.1.	Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Lampung (Dalam Jutaan Rupiah), Triwulan I 2019 dan Triwulan I 2018.....	17
Grafik 4.2.	Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Lampung (Dalam Jutaan	



	Rupiah), Triwulan I 2019.....	18
Grafik 4.3.	Perbandingan Pendapatan Konsolidasian (Dalam Jutaan Rupiah), Triwulan I 2019 dan Triwulan I 2018.....	18
Grafik 4.4.	Perbandingan Belanja dan Transfer Pempus dan Pemda terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2019	20
Grafik 4.5.	Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan I tahun 2019.....	20
Grafik 4.6.	Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Lampung Triwulan I 2018.....	21
Grafik 5.1.	(A) Presentase UMK Non Pertanian Menurut Skala Usaha Provinsi Lampung, 2016 (B) Presentase UMK yang Tidak Mempunyai Akses ke Bank dan LKBB menurut Akses terhadap Permodalan, Provinsi Lampung (2016).....	24



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBD Lampung 2019.....	1
Tabel 2.1.	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Lampung s.d. Akhir Triwulan I (dalam miliar), 2018 dan 2019.....	7
Tabel 2.2.	Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi Lampung dengan kontribusi terbesar (dalam miliar), 2018 dan 2019.....	9
Tabel 2.3.	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Lampung (miliar rupiah), 2019.....	11
Tabel 3.1.	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Akhir Triwulan I 2019 dan 2018.....	12
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Lampung s.d Triwulan I Tahun 2019..	15
Tabel 3.3.	Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Lampung s.d Triwulan I Tahun 2019..	16
Tabel 4.1.	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Lampung (dalam jutaan rupiah), Triwulan I 2019....	17
Tabel 4.2.	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019 (dalam jutaan rupiah).....	19
Tabel 5.1.	Jumlah UMK dan Presentase UMK di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Lampung, 2017.....	22
Tabel 5.2.	Jumlah UMK, Jumlah tenaga kerja, dan rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori di Provinsi Lampung	23
Tabel 5.3.	Total Akad Pembiayaan YMi di Provinsi Lampung, Januari-Mei 2019.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2019.....	21
-------------	--	----



BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBD Lampung 2019

No.	Uraian	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4-5,7%
2	Inflasi	3,5-4%
3	TPT	4%
4	Pendapatan perkapita	Rp.40.56 juta
5	Penduduk miskin	12,36%
6	IPM	70%
7	Indeks Gini	0.33 - 0,32
8	NTP	107
9	Pertumbuhan PAD	7,67%

Sumber: Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Lampung, 2019

Dalam rangka sinkronisasi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019 adalah “Memantapkan pertumbuhan yang berkualitas, berdaya saing, dan berkeadilan”. Prioritas pembangunan antara lain diarahkan untuk memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas untuk pengembangan wilayah dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia untuk perluasan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Prospek perekonomian Lampung di tahun 2019 kian membaik melanjutkan tren dalam tiga tahun terakhir meski perekonomian global dan nasional masih diwarnai gejolak ketidakpastian menuju era normalisasi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perekonomian Lampung tetap bertumpu pada konsumsi rumah tangga yang didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat karena adanya peningkatan gaji PNS, kenaikan upah minimum tenaga kerja serta tingkat inflasi yang tetap terjaga. Kinerja investasi (Penanaman Modal Tetap Bruto) berupa pembangunan infrastruktur listrik, jalan tol, dan irigasi semakin memperkuat kapasitas ekonomi Lampung dengan konektivitas antar wilayah yang semakin mudah. Disisi kelembagaan, pemerintah daerah telah membentuk Tim Satgas Investasi Daerah serta Forum Investasi Lampung (FOILA) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia perwakilan Lampung untuk meningkatkan investasi di Provinsi Lampung.

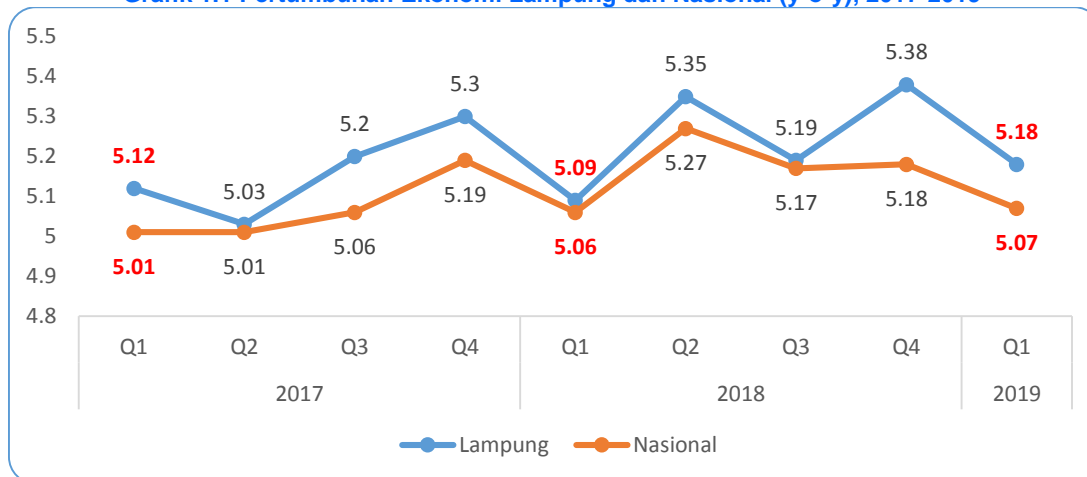
A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2019 tumbuh 5.18 persen (yoy) menguat dibandingkan triwulan I-2018 (yoy) sebesar 5.09 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,07 persen dan pertumbuhan ekonomi Sumatera 4,55 persen sekaligus menempatkan Lampung di peringkat ketiga pertumbuhan tertinggi di Sumatera setelah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp.87,19



triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp.59,34 triliun. Dengan *share* 2,12 persen terhadap PDB nasional, kontribusi Provinsi Lampung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal ini adalah 0,11 persen.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (y-o-y), 2017-2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung

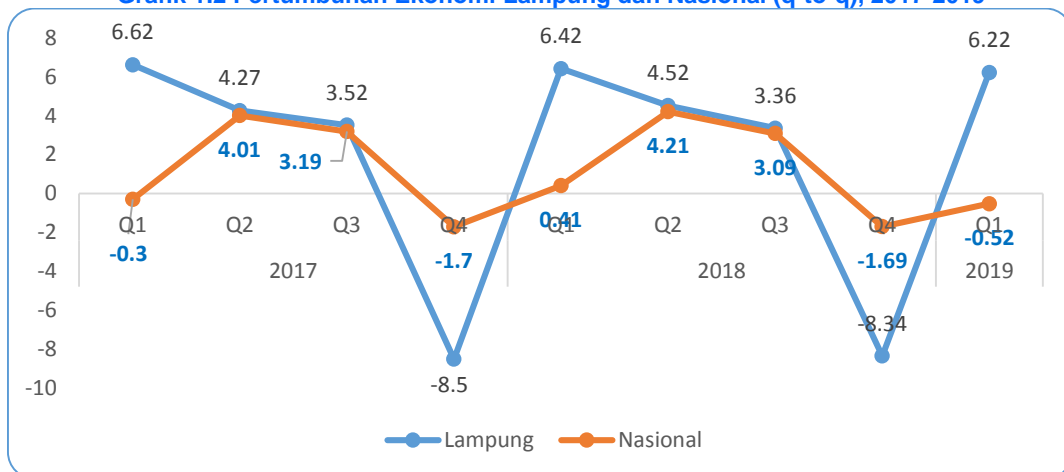
Menurut lapangan usaha, struktur perekonomian Lampung masih didominasi sektor pertanian (30,88 persen). Adapun industri pengolahan dengan porsi 18,62 persen terhadap pembentukan PDRB Lampung menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Lampung di triwulan I (yoy) dengan 1,32 persen. Pertumbuhan tertinggi (yoy) dicapai oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,55 persen) yang meningkat selama kegiatan kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan Legislatif (Pileg) baik itu permintaan hotel dan restoran, serta usaha kafe baru yang semakin menjamur di Bandar Lampung. Sektor jasa pendidikan tumbuh 9,98 persen (yoy) seiring meningkatnya aktivitas bimbingan belajar menjelang ujian nasional serta persiapan masuk universitas.

Ditinjau dari sisi permintaan, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) menjadi motor utama perekonomian dengan *share* mencapai 60,69 persen sekaligus juga menjadi kontributor utama pertumbuhan pada triwulan ini (yoy) dengan 3,33 persen. PKRT tumbuh terutama pada kelompok bahan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi. Kenaikan pendapatan PNS pada 2019 juga mendorong peningkatan PKRT.

Aktivitas kampanye dan persiapan Pilpres dan Pileg, serta penggalangan dana untuk pemulihan pascabencana tsunami di Selat Sunda mendorong Konsumsi LNPRRT tumbuh tertinggi yaitu 10,20 persen (yoy) pada triwulan I 2019. Konsumsi pemerintah juga tumbuh positif karena realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial meningkat.



Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional (q-to-q), 2017-2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Apabila dibandingkan kuartal empat tahun 2018 (qtoq), pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I 2019 mencapai 6,22 persen dan tercatat sebagai yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Pertumbuhan qtoq sangat bergantung pada faktor musiman, terutama untuk sektor pertanian. Sektor pertanian pada triwulan ini tumbuh tinggi dibandingkan triwulan IV 2018 terutama sub sektor tanaman pangan seperti jagung yang tumbuh sangat tinggi mencapai 336 persen, padi tumbuh 25,45 persen, serta hortikultura dan kopi di Lampung Barat. Namun sektor pertanian sedikit berkontraksi dengan adanya banjir di beberapa wilayah Lampung di awal tahun, serta hujan lebat dan ombak tinggi yang membuat nelayan menunda untuk ke laut sehingga berdampak pada turunnya jumlah tangkapan ikan.

Melanjutkan tren, pengeluaran konsumsi pemerintah selalu tumbuh negatif pada triwulan I dibandingkan triwulan IV tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pola realisasi anggaran pemerintah yang masih menumpuk di akhir tahun dan relatif rendah di awal tahun. Sementara Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh negatif seiring penyelesaian beberapa proyek infrastruktur di akhir tahun serta turunnya realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan I (qtoq) hingga -97,17 persen.

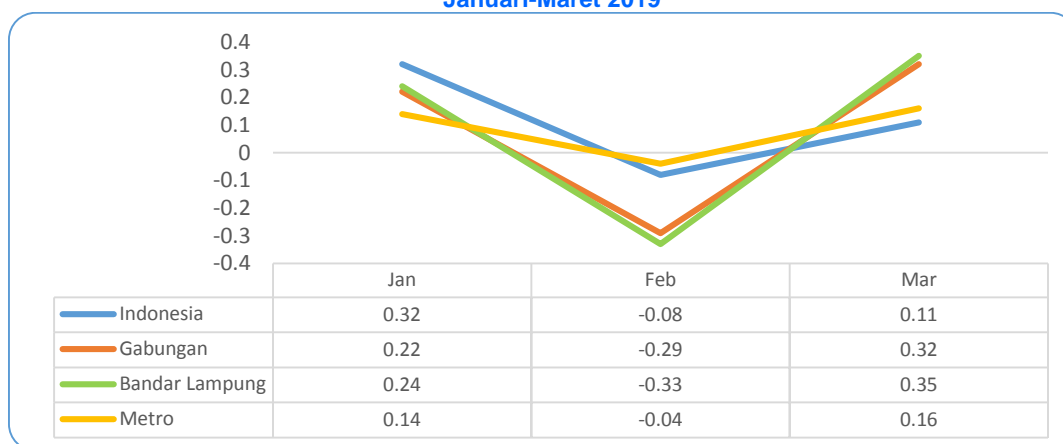
Pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2019 diproyeksikan akan lebih baik dibanding triwulan I-2019 didorong oleh peningkatan PK-RT dan PK-LNPRT. Konsumsi rumah tangga meningkat pada *festive season* ramadhan, lebaran, serta libur sekolah didukung peningkatan pendapatan masyarakat dari Tunjangan Hari Raya. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor diperkirakan akan tumbuh tinggi sejalan dengan menguatnya konsumsi rumah tangga pada hari raya. Hal ini juga didasarkan pada perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Lampung yang dirilis BPS di angka 113,77 di triwulan II 2019 jauh lebih optimis dibanding hasil ITK Triwulan I 2019 yang hanya sebesar 99,56.



B. INFLASI

Perhitungan inflasi di Provinsi Lampung dilakukan di dua kota yaitu Bandar Lampung dan Metro dengan menggunakan tahun dasar 2012. Untuk itu digunakan istilah inflasi gabungan (Metro dan Bandar Lampung). Selama triwulan I 2019, indeks harga konsumen (IHK) gabungan Lampung berfluktuasi sejalan dengan tren IHK Nasional. Inflasi bulanan Januari tercatat 0,22 persen, lalu di Februari tercatat deflasi -0,29 persen, dan kembali mengalami inflasi pada bulan Maret sebesar 0,32 persen.

Grafik 1.3 Inflasi Bulanan Bandar Lampung, Metro, Gabungan, dan Nasional, Januari-Maret 2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Inflasi Januari terutama disumbang oleh kelompok bahan makanan (0,23 persen) dengan komoditas yang dominan andil inflasinya adalah beras (0,12 persen), cung kediro (0,05 persen), dan bawang merah (0,04 persen). Sementara itu turunnya harga beberapa komoditas seperti cabe merah (-0,18 persen), beras (-0,13 persen), dan bawang merah (-0,08 persen) di bulan Februari menyebabkan deflasi. Turunnya harga BBM yang berlaku sejak 10 Februari 2019 juga memberikan andil terhadap deflasi Februari sebesar -0,02 persen. Kenaikan harga beberapa komoditas bahan makanan seperti tomat sayur, bawang merah, cung kediro, dan cabai merah kembali menjadikan IHK naik di bulan Maret 2019. Naiknya biaya pemeliharaan/service kendaraan juga turut andil dalam inflasi di bulan ini. Sebesar

Inflasi triwulan II 2019 diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan I seiring dengan kenaikan permintaan di momen puasa dan Lebaran pada bulan Mei dan Juni 2019. Pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung akan terus berupaya mengendalikan harga bahan pangan di bulan Ramadhan dan Lebaran melalui operasi pasar di beberapa wilayah untuk memastikan ketersediaan stok sehingga masyarakat tidak melakukan aksi *panic buying* saat *festive season*. Pasokan bumbu-bumbuan seperti bawang merah dan bawang putih harus ditingkatkan untuk mengimbangi tingginya permintaan. Ketersediaan pasokan beras di Bulog Lampung hingga 16 bulan ke depan serta panen raya padi di bulan April diharapkan menekan kenaikan IHK bahan pangan di triwulan II 2019.



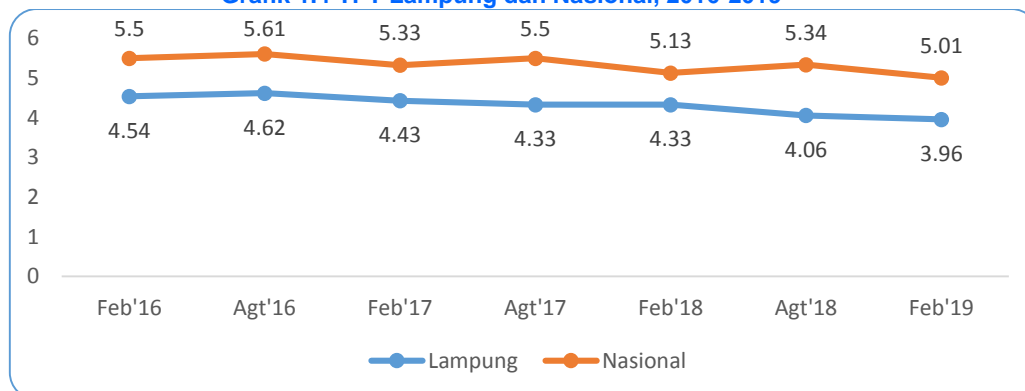
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada periode Februari 2019 turun sebesar 0,34 poin menjadi 3,96 persen dibandingkan kondisi Februari 2018. Perkotaan menjadi kantong pengangguran Lampung dengan TPT 7,48 persen semakin meningkat dibanding Februari tahun lalu sebesar 6,30 persen. Sementara TPT di perdesaan turun 1,05 persen menjadi 3,53 persen pada Februari 2019. Turunnya angka pengangguran di desa diantaranya karena Dana Desa yang bersifat padat karya serta dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat sehingga menyerap tenaga kerja di desa.

Sementara jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, TPT tertinggi sebesar 8,15 persen pada jenjang pendidikan perguruan tinggi dan terendah pada jenjang pendidikan SD ke bawah yaitu 1,18 persen. Kondisi ini terjadi karena penduduk dengan pendidikan rendah bersedia menerima pekerjaan apapun, sedangkan lulusan perguruan tinggi relatif lebih pilih-pilih pekerjaan. Tingginya TPT jenjang pendidikan perguruan tinggi didominasi oleh lulusan baru/*fresh graduate*.

Grafik 1.4 TPT Lampung dan Nasional, 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Meskipun TPT Lampung berada di bawah rata-rata TPT Nasional (5,01 persen), perlu dicermati bahwa mayoritas penduduk di Lampung bekerja pada sektor informal sebesar 71,39 persen. Pekerja di sektor informal lebih rentan untuk keluar dari pekerjaan saat ini. Termasuk pula dalam sektor informal adalah pekerja tidak dibayar.

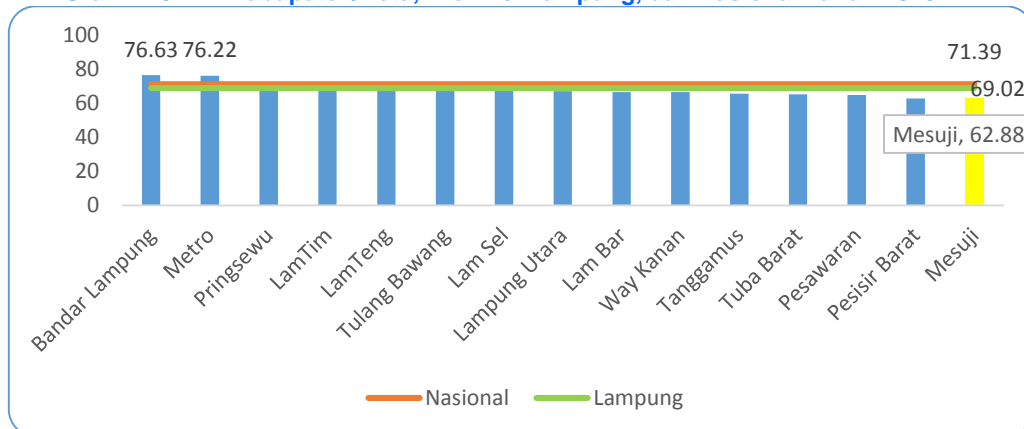
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. IPM Lampung terus



melanjutkan tren peningkatan dalam 9 tahun terakhir dan tahun 2018 mencapai 69,02. Pertumbuhan IPM Lampung tahun 2018 mencapai 1,13 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2017. IPM Lampung selama kurun 2010-2018 rata-rata tumbuh 1,00 per tahun, lebih cepat daripada nasional. Kendati terus meningkat, status pembangunan manusia Lampung masih sedang dan berada di bawah IPM nasional yaitu 71,39.

Grafik 1.5 IPM Kabupaten/Kota, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan dengan komponen pengeluaran per kapita tercatat tumbuh paling menonjol yaitu 4,73 persen menjadi Rp.9,858 juta. Usia harapan hidup saat lahir telah mencapai 70,18 tahun. Anggaran pendidikan yang relatif besar belum dapat mendorong dimensi pengetahuan/pendidikan tumbuh lebih tinggi. Harapan lama sekolah hanya tumbuh 1,20 persen, dari 12,46 tahun menjadi 12,61 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah tumbuh 0,39 persen dari 7,79 tahun menjadi 7,82 tahun. Di tingkat Kabupaten/Kota, disparitas IPM masih kentara dimana Bandar Lampung dan Metro telah mencapai level tinggi dengan IPM 76,63 dan 76,22 jauh diatas rata-rata IPM Lampung dan nasional. Dari 13 Kabupaten, hanya 3 Kabupaten yang berhasil mencapai IPM diatas rata-rata Lampung yaitu Lampung Timur, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Sedangkan 10 Kabupaten lainnya masih berada di bawah rata-rata IPM Lampung. Kabupaten Mesuji tercatat paling rendah yaitu 62,88 namun mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2018 sebesar 1,63 persen. Oleh karenanya perlu sinergi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengejar ketertinggalan dari IPM Nasional diantaranya dengan penajaman program di bidang pendidikan dan kesehatan agar berdampak signifikan pada IPM Lampung.



II. PERKEMBANGAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Penerimaan perpajakan pada triwulan I tahun 2019 masih menjadi sumber utama pendapatan negara di Provinsi Lampung dengan kontribusi 90,28 persen dari total pendapatan yaitu sebesar Rp1,25 triliun. Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak hanya memberikan kontribusi 9,72 persen sebesar Rp134,33 miliar.

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Lampung
s.d. Akhir Triwulan I (dalam miliar), 2018 dan 2019

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	10,995.45	1,696.79	11,599.54	1,381.82
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	10,443.04	1,696.79	11,599.54	1,381.82
1. Penerimaan Pajak Dalam Negeri	10,443.04	1,538.03	11,023.41	1,247.49
2. PNBPN	552.41	158.76	576.13	134.33
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	33,184.23	7,302.40	32,983.76	7,062.51
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	10,851.53	1,323.54	10,272.11	1,779.56
1. Belanja Pegawai	3,457.34	588.53	3,332.57	652.74
2. Belanja Barang	4,674.15	451.65	4,084.97	595.26
3. Belanja Modal	2,700.98	281.55	2,836.69	529.28
4. Belanja Bantuan Sosial	19.06	1.81	17.88	2.28
5. Belanja Lain-Lain	-	-	-	-
II. BELANJA KE DAERAH DAN DANA DESA	22,332.70	5,978.86	22,711.65	5,282.95
1. Transfer Ke Daerah	19,967.05	5,474.40	20,081.36	4,905.84
a. Dana Perimbangan	19,967.05	5,474.40	20,081.36	4,905.84
1) Dana Alokasi Umum	12,891.53	4,297.18	13,361.96	4,432.10
2) Dana Bagi Hasil Pajak	797.40	138.62	548.95	78.98
4) Dana Alokasi Khusus Fisik	2,361.71	392.08	2,020.67	-
5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3,916.41	646.52	4,149.78	394.76
b. Dana Transfer Lainnya	-	-	-	-
2. Dana Insentif Daerah	277.25	112.38	203.18	88.21
3. Dana Desa	2,088.40	392.08	2,427.11	288.90
Surplus / Defisit	(32,631.82)	(5,605.61)	(32,407.63)	(5,680.69)

Sumber : LKBUN Kanwil DJPb Prov. Lampung (data diolah)

Sampai dengan triwulan I 2019, defisit APBN di lingkup Provinsi Lampung meningkat 1,34% menjadi Rp5,69 triliun dari Rp5,61 triliun pada triwulan I 2018. Meningkatnya defisit tersebut didorong dari sisi penerimaan dimana pendapatan turun 18,56% atau Rp314,97 miliar karena melorotnya pendapatan pajak.

A. Pendapatan Negara

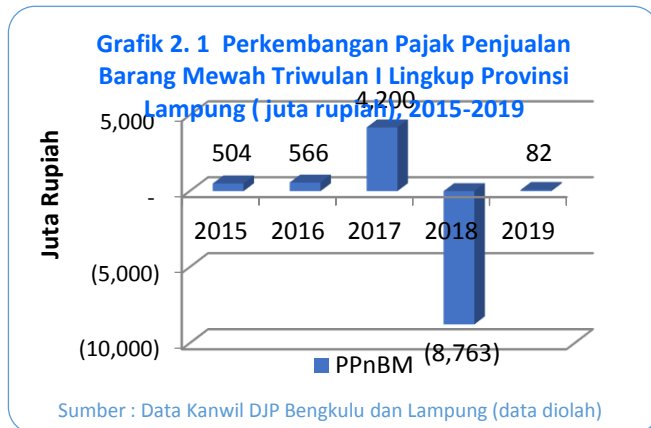
1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Lampung pada Triwulan I 2019 baru mencapai Rp1,38 triliun, menurun cukup tinggi 18,56 persen dibandingkan triwulan I 2018.



a) Pajak Penghasilan (PPh)

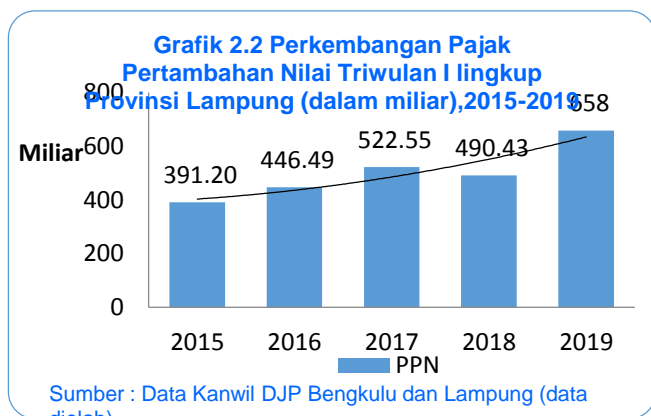
Penerimaan PPh pada triwulan I 2019 terus meningkat mencapai Rp937,95 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pembayaran final oleh sektor lembaga



keuangan (perbankan). Ditambah lagi, pada triwulan I 2019, adanya peningkatan PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29 terkait SPT Tahunan. Penerimaan PPh Triwulan I 2019 (Rp937,95 miliar) merupakan penerimaan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir pada triwulan yang sama. Hal ini terindikasi sudah semakin baik kinerja yang dilaksanakan oleh petugas pajak, dengan memberikan himbauan penyampaian SPT Tahunan dan pengawasan pembayaran masa.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan PPN sampai Triwulan I 2019, meningkat 34,3% dibandingkan triwulan I 2018 menjadi Rp658,41 miliar. Hal ini disebabkan pembayaran di sektor perdagangan khususnya hasil bumi belum secara



maksimal ditingkatkan. Masih menjadi tugas bagi pemerintah dalam menggali potensi pajak yang ada khususnya dalam potensi pedagang pengumpul.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

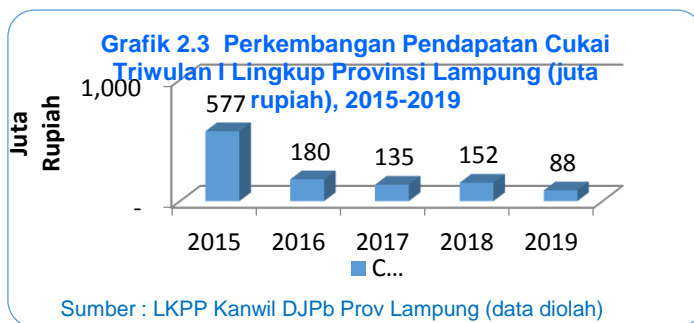
Penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2019 hanya mencapai Rp81,94 miliar. jika dibandingkan dengan tahun 2017 pada triwulan yang sama cukup terpaut jauh yang mencapai Rp4,2 miliar. Sedangkan tahun 2018 mengalami minus



sebesar Rp8,7 miliar yang disebabkan oleh kesalahan setoran terkait PPN oleh wajib pajak pada tahun 2017 dan telah dikoreksi sehingga angkanya minus Rp8,7 miliar.

d) Penerimaan Cukai

Pendapatan Cukai pada triwulan I 2019 sebesar Rp88,50 juta, lebih rendah 41,78 persen dibandingkan tahun 2018 pada triwulan yang sama



yang mencapai Rp152 juta. Tidak terlalu berbeda dengan penerimaan cukai pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan cukai meliputi Penerimaan Cukai Tembakau, Penerimaan Administrasi Cukai, Cukai Ethyl Alkohol dan Penerimaan Cukai Lainnya.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sampai dengan akhir triwulan I 2019, Pendapatan PNBP untuk Provinsi Lampung sebesar Rp134,33 miliar, menurun 15,4 persen dibandingkan pada tahun 2018 di triwulan yang sama sebesar Rp158,76 miliar.

Berikut adalah PNBP yang berkontribusi tertinggi atas Penerimaan PNBP lingkup Provinsi Lampung.

Tabel 2.2 Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Provinsi Lampung Dengan Kontribusi Terbesar (dalam miliar), 2018 dan 2019

Penerimaan PNBP (1)	Kontribusi Tahun 2018 (2)	Presentase Tahun 2018 (3)	Kontribusi Tahun 2019 (4)	persentase Tahun 2019 (5)
Pendapatan Biaya Pendidikan	37.92	32.53%	39.13	29.13%
Pendapatan Jasa Kepelabuhan	-	0.00%	12.25	9.12%
Pendapatan Jasa Bandar Udara Kepelabuhan dan Kenavigasian	22.25	19.09%	11.53	8.58%
Pendapatan Surat STNK	14.71	12.62%	8.01	5.96%
Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	9.40	8.06%	7.46	5.55%
Total PNBP	116.56		134.33	

Sumber : LKPP UAPPAW Kanwil DJPb Provinsi Lampung, OM SPAN,

a) Penerimaan PNBP Pendapatan Biaya Pendidikan

Pada Triwulan I Tahun 2019, Pendapatan PNBP yang memberikan kontribusi terbesar di wilayah Provinsi Lampung adalah Pendapatan Biaya Pendidikan. Kontribusi yang diberikan sebesar Rp39,13 miliar atau 29,13 persen. Pada



tahun sebelumnya jasa ini memberikan kontribusi sebesar Rp37,92 miliar atau 32,53 persen

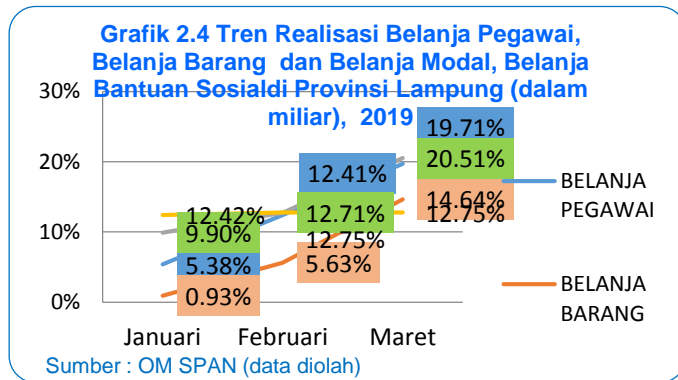
b) Penerimaan PNBP Jasa Kepelabuhan

Pendapatan Biaya Pendidikan pada triwulan I 2019 menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan PNBP sebesar Rp12,25 miliar atau 9,12 persen. Pendapatan ini pada tahun sebelumnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan PNBP melalui pendapatan jasa bandar udara kepelabuhanan dan kenavigasian sebesar Rp22,25 miliar atau 19,09%.

B. Belanja Negara

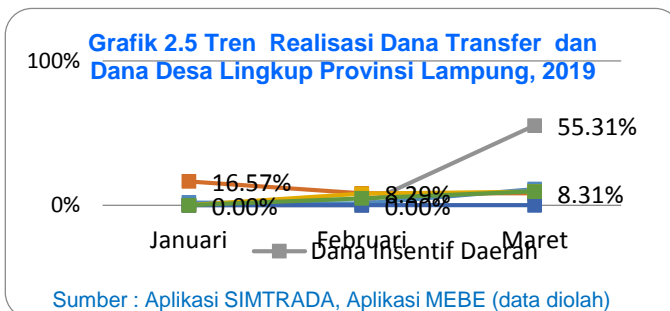
1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan I 2019 mencapai Rp1.78 triliun, meningkat 34,45 persen dibandingkan tahun 2018 (Rp1,32 triliun). Kenaikan realisasi belanja barang



(31,80%), belanja modal (87,99%) dan Belanja bantuan sosial (25,97%) yang menyebabkan kenaikan realisasi agregat tersebut. Realisasi belanja modal yang selalu diharapkan lebih baik penyerapannya, pada triwulan ini menyerap 18,66% dari pagu belanja modal dengan kenaikan pagu hanya 5,02 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,8 triliun.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)



Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa hingga akhir bulan Maret 2019 di Provinsi Lampung telah terealisasi sebesar Rp5,28 triliun atau 23,26 persen. Tren realisasi perbulan

yang terjadi terlihat bahwa Dana Insentif Daerah (DID) baru terealisasi di Maret sebesar 43,41% dan Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat setiap bulannya sesuai dengan pendapatan real bagi daerahnya



3. Pengelolaan BLU

Di wilayah Provinsi Lampung terdapat 5 (lima) satker BLU yaitu Universitas Lampung, Poltekes Tanjung Karang, IAIN Raden Inten, Barstrand Lampung dan Bandar Udara Radin Inten Lampung.

Dilihat dari ketersediaan dana yang bersumber dari BLU pada tahun 2019, Bandar Udara Radin Inten Lampung memiliki kemandirian tertinggi sebesar 67,01 persen dibandingkan dengan satker BLU lainnya,.

4. Manajemen Investasi Pusat.

Pemerintah Pusat menggunakan instrumen pembiayaan berupa Kredit Program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi). Per 31 Maret 2019, Penyaluran KUR di Provinsi Lampung untuk usaha Mikro sebanyak Rp615,19 miliar untuk 32.698 debitur, Usaha Kecil sebesar Rp292,58 miliar untuk 2.362 debitur, usaha TKI sebesar Rp16,13 miliar untuk 1.030 debitur. Melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank di Provinsi Lampung telah disalurkan Usaha Mikro (UMi) sebesar Rp21,00 miliar untuk 4.778 debitur.

C. Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.3 Perkiraan Realisasi APBN Lingkupi Provinsi Lampung (miliar rupiah), 2019

URAIAN	Pagu Tahun 2019	Realisasi Triwulan I Tahun 2019		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV Tahun 2019	
		Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
PENDAPATAN NEGARA	11,599.54	1,381.82	11.91%	9,480.30	81.73%
- Penerimaan Pajak	11,023.41	1,247.49	11.32%	8,610.39	78.11%
- PNBPNP	576.13	134.33	23.32%	807.62	140.18%
BELANJA NEGARA	32,983.76	568.15	1.72%	31,489.60	95.47%
- Belanja Pegawai	3,332.57	652.74	19.59%	3,254.59	97.66%
- Belanja Barang	4,084.97	595.26	14.57%	3,694.04	90.43%
- Belanja Modal	2,836.69	529.28	18.66%	2,631.88	92.78%
- Belanja Bansos	17.88	2.28	12.75%	17.33	96.90%
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa	22,711.65	5,282.95	23.26%	21,982.61	96.79%
Defisit/Surplus	(21,384.22)	813.67		(22,009.29)	

Sumber : OM SPAN (data diolah)

Prognosis realisasi Triwulan II sampai IV 2019, menggunakan tren realisasi APBN yang terjadi mulai 2012 sampai dengan 2019.

Perkiraan pendapatan sampai akhir triwulan IV kemungkinan besar hanya mencapai 81,73%. Pendapatan negara diperkirakan menurun 5,94% di dorong oleh penurunan pendapatan pajak. Dari sisi pengeluaran, belanja negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar 0,30% didorong oleh tren realisasi belanja barang yang tidak mencapai 90%, kecuali di tahun 2017 yang mencapai 93,62%.



III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Realisasi pendapatan APBD sampai dengan triwulan I tahun 2019 adalah Rp5,77 triliun meningkat bila dibanding dengan triwulan I tahun 2018 yang hanya sebesar Rp4,75 triliun. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2019 adalah Rp3,07 triliun, meningkat dibanding dengan periode triwulan I tahun 2018.

Tabel 3.1. Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Akhir Triwulan I 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan	30.965.487.316.748	5.770.150.592.414	27.832.471.732.859	4.755.539.094.320
PAD	5.709.742.539.054	444.214.054.828	5.205.614.138.663	749.955.870.920
Pajak daerah	3.775.048.507.800	289.491.651.462	3.818.973.428.656	602.202.730.349
Retribusi daerah	129.909.949.124	18.828.005.111	131.778.160.794	16.628.804.808
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	103.187.329.952	4.422.493.295	84.346.108.195	3.906.597.785
Lain-lain PAD yang sah	1.701.596.752.178	131.471.904.960	1.170.516.441.017	127.217.737.979
Dana Perimbangan	19.884.556.543.495	4.737.863.757.986	18.675.135.819.665	3.624.314.034.183
DBH	1.225.389.253.310	188.240.780.777	782.861.604.615	82.459.171.400
DAU	12.888.489.221.000	4.164.909.402.000	11.941.751.562.000	3.146.803.665.160
DAK	5.770.678.069.185	384.713.575.209	5.950.522.653.050	395.051.197.623
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.371.188.234.199	588.072.779.600	3.951.721.774.531	381.269.189.217
Hibah	946.168.944.177	44.000.107.000	496.126.911.979	27.943.290.000
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	1.961.826.521.071	199.769.590.617	1.292.236.126.538	16.371.094.960
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	1.372.240.267.000	262.134.461.000	1.444.649.843.000	217.431.347.800
DID	9.689.913.000	4.844.956.000	0	0
Dana Desa	222.075.847.000	44.415.169.400	74.834.650.000	14.941.631.200
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	116.100.000.000	0	18.000.000.000	0
Lain-lain	743.086.741.950	32.908.495.583	625.874.243.014	104.581.825.257
Belanja	31.504.074.066.503	3.079.339.432.564	29.583.111.735.298	2.846.417.885.729
Belanja Tidak Langsung	18.135.376.694.439	2.332.391.713.892	16.391.088.894.819	2.089.548.035.988
Belanja Pegawai	11.306.076.210.617	1.735.941.039.397	9.875.010.235.561	1.637.981.390.022
Belanja Bunga	61.063.750.000	13.375.123.059	61.563.333.333	4.729.432.892
Belanja Subsidi	21.652.030.960	0	4.744.844.438	463.000.000
Belanja Hibah	1.798.695.739.561	263.033.466.980	1.940.655.874.630	416.142.047.654
Belanja Bantuan sosial	95.897.007.710	4.201.500.000	65.689.948.400	1.953.500.000
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/dan Pemdes	1.321.441.745.000	262.749.608.396	1.485.458.375.425	11.066.758.763
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/dan Pemdes	3.492.024.383.632	52.409.941.060	2.696.519.457.072	15.420.572.649
Belanja Bantuan Keuangan kpd Partai Politik	2.497.162.565	0	240.329.448.057	0
Belanja tidak terduga	36.028.664.394	681.035.000	21.117.377.904	1.791.334.008
Belanja Langsung	13.368.697.372.064	746.947.718.672	13.192.022.840.479	756.869.849.741
Belanja Pegawai	766.680.561.455	81.550.616.231	807.491.458.449	98.891.635.369
Belanja Barang dan jasa	6.731.981.302.753	525.239.914.524	5.940.398.806.549	447.942.550.254
Belanja Modal	5.870.035.507.856	140.157.187.917	6.444.132.575.481	210.035.664.118
Surplus/(Defisit)	-538.586.749.755	2.690.811.159.850	-1.750.640.002.440	1.909.121.208.591

Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung

Komposisi Pendapatan Pemda di Provinsi Lampung masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada triwulan I tahun 2019 realisasi dana perimbangan mencapai Rp4,73 triliun (82,11 persen dari total pendapatan).

Surplus APBD triwulan I tahun 2019 lingkup Provinsi Lampung mengalami kenaikan Rp781,68 miliar dari Rp1,90 triliun pada triwulan I tahun 2018. Kenaikan tersebut



karena meningkatnya realisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah (Rp5,325 triliun). Sementara itu realisasi belanja langsung (belanja pegawai dan modal) triwulan I tahun 2019 (Rp221,70 miliar) menurun bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2018 (Rp308,92 miliar). Penurunan tersebut perlu mendapat perhatian dari pemda karena dapat berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Lampung.

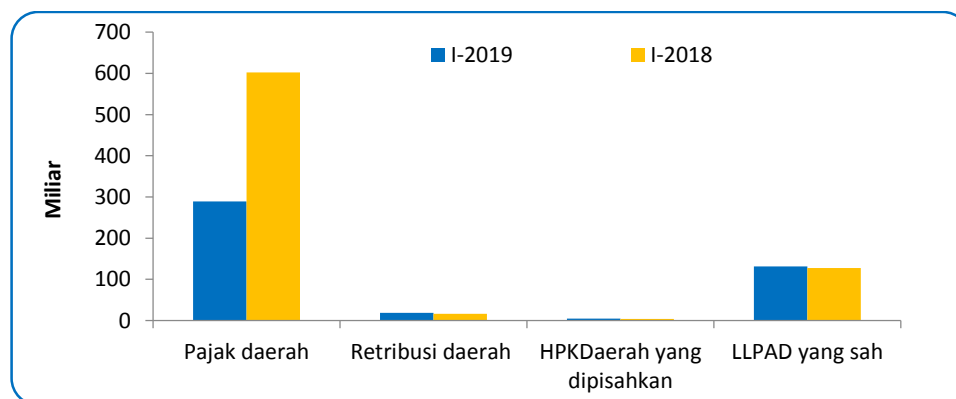
A. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Lampung triwulan I tahun 2019 mencapai Rp5,77 triliun. Pendapatan daerah terdiri dari PAD (Rp444,21 miliar) Dana Perimbangan (Rp4,73 triliun) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Rp588,07 miliar). Realisasi pendapatan triwulan I tahun 2019 meningkat Rp1,01 triliun (21,34 persen) dibandingkan dengan realisasi pendapatan triwulan I tahun 2018.

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD triwulan I tahun 2019 menurun Rp305,74 miliar (40,77 persen) bila dibanding realisasi triwulan I tahun 2018. Penurunan tersebut karena rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah triwulan I tahun 2019. Sedangkan realisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah rata-rata realisasinya naik bila dibanding dengan realisasi triwulan I tahun 2018.

Grafik 3.1. Realisasi PAD Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2019 dan 2018



Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung

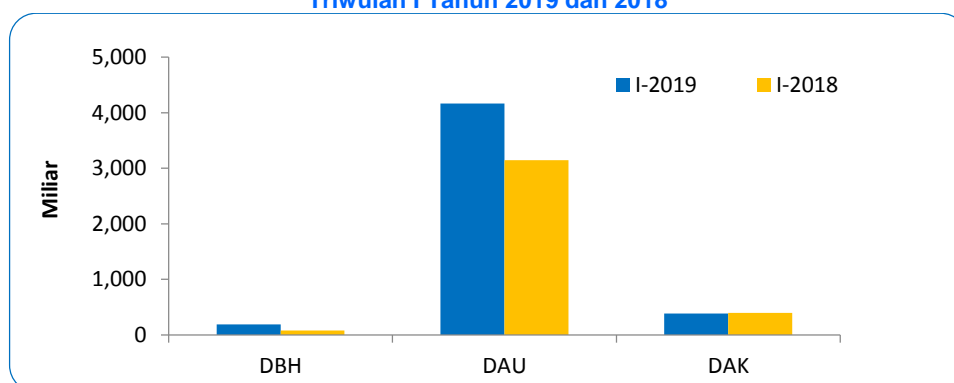
2. Pendapatan Transfer

Realisasi penerimaan dana perimbangan triwulan I tahun 2019 mencapai Rp4,73 triliun, realisasi ini lebih tinggi dibanding triwulan I tahun 2018 yang hanya Rp3,62 triliun. Komposisi nilai dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (Rp4,16 triliun), Dana Alokasi Khusus (Rp384,71 miliar) dan Dana Bagi Hasil (Rp188,24 miliar). Perubahan penyaluran DAK (khususnya DAK Fisik)



berdampak pada percepatan penyaluran DAK, khususnya di Provinsi Lampung. Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah di wilayah Provinsi Lampung untuk triwulan I tahun 2019 sebesar 82,11 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dalam mendanai APBD-nya.

Grafik 3.2. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2019 dan 2018



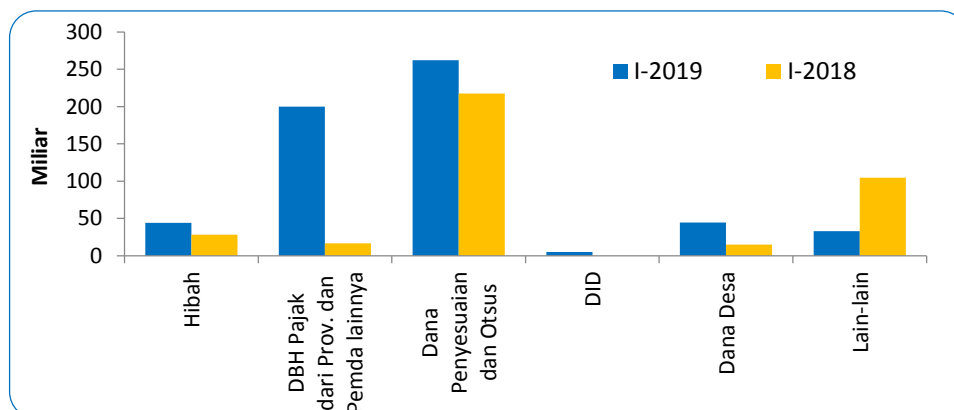
Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Komposisi Lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD di Provinsi Lampung tidak terlalu besar. Realisasinya pada triwulan I tahun 2019 adalah Rp588,07,4 miliar, naik bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2018. Secara keseluruhan, realisasi triwulan I tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2018.

Sumber utama pendapatan ini berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya. Realisasinya sampai dengan triwulan I tahun 2019 adalah Rp315,15 miliar.

Grafik 3.3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Lampung, Triwulan I Tahun 2019 dan 2018



Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung



B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi belanja pegawai triwulan I tahun 2019 naik 5,98% bila dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2018. Sedangkan realisasi belanja modal menurun 33,27% dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2018. Penurunan tersebut akibat rendahnya penyerapan belanja modal pada triwulan I tahun 2019. Realisasi belanja barang triwulan I tahun 2019 naik bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018 yaitu 17,26%.

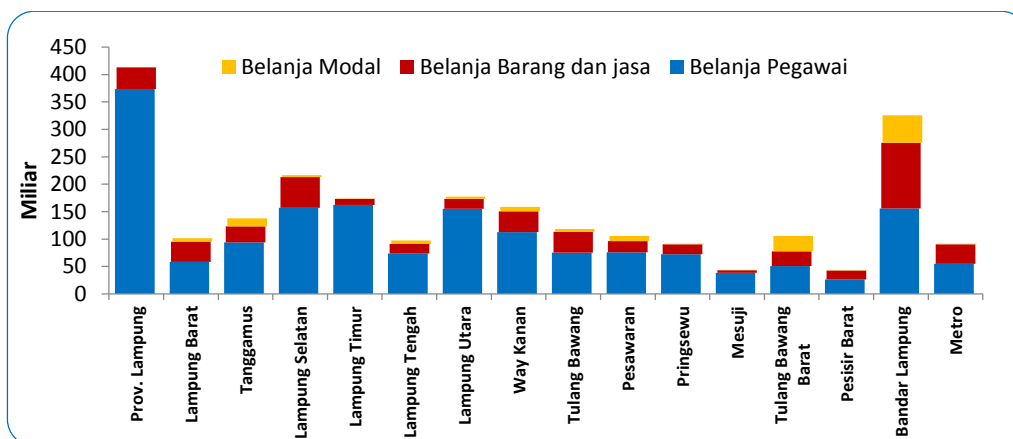
Tabel 3.2. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Lampung s.d Triwulan I Tahun 2019

Jenis Belanja	Pagu 2019	Realisasi Triwulan I 2019	Realisasi Triwulan I 2019 (%)	Realisasi s.d Triwulan I 2018	Δ Realisasi (%)
Belanja Pegawai	11.306.076.210.617	1.735.941.039.397	15,35%	1.637.987.390.022	5,98%
Belanja Barang	6.731.981.302.753	525.239.914.524	7,80%	447.942.550.254	17,26%
Belanja Modal	5.870.035.507.856	140.157.187.917	2,39%	210.035.664.118	-33,27%

Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung

Sampai dengan triwulan I tahun 2019 pemda dengan tingkat serapan tertinggi adalah Pemprov Lampung disusul Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

Grafik 3.4. Realisasi Belanja Pegawai, Barang & Jasa dan Modal Per Kabupaten/Kota, Triwulan I Tahun 2019



Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

APBD di Provinsi Lampung dialokasikan untuk membiayai 46 (empat puluh enam) urusan antara lain urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan lain lain. Secara agregat, urusan pendidikan mendapatkan alokasi 35,55%, urusan keuangan 30,37%, urusan kesehatan 14,33%, urusan



pekerjaan umum 13,58%, urusan pemerintahan umum 13,41% dan urusan penataan ruang 5,74% dari total APBD. Sedangkan urusan pertanian hanya mendapat alokasi 2,13% dari total APBD. Dilihat dari klasifikasi urusan, kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung lebih menitikberatkan pada pelayanan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian di wilayah Provinsi Lampung.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2019

Untuk memproyeksikan realisasi APBD di Provinsi Lampung telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perkembangan indikator ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Proyeksi realisasi APBD sampai dengan triwulan IV tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Lampung s.d Triwulan I Tahun 2019

Uraian	Pagu 2019	Realisasi Triwulan I 2019		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2019	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan	30.965.487.316.748	5.770.150.592.414	18,63%	28.620.621.794.103	92,64%
Belanja	29.583.111.735.298	2.846.417.885.729	9,62%	24.089.527.886.053	81,43%
Surplus/Defisit	1.382.375.581.450	2.923.732.706.685		4.531.093.908.050	

Sumber : LRA TA 2019 Pemda se-Provinsi Lampung

Dengan memperhitungkan rata-rata persentase penambahan realisasi dari triwulan I hingga akhir tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 pada masing-masing jenis pendapatan, realisasi pendapatan pada akhir tahun 2019 diperkirakan akan mencapai ±Rp28,62 triliun. Realisasi belanja diproyeksikan pada akhir tahun 2019 mencapai ±Rp24,09 triliun.



BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS
PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu. LKPK Tingkat Wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung periode triwulan I tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Lampung (Dalam Juta Rupiah), Triwulan I 2019

Uraian	2019				2018
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	1.614.512,04	5.605.974,23	2.059.731,75	-74,73	8.151.384,76
Pendapatan Perpajakan	1.480.185,55	289.476,36	1.769.661,91	-17,54	2.146.127,89
Pendapatan Bukan Pajak	134.326,49	5.316.497,86	290.069,84	-95,15	5.984.887,54
Hibah		18.098,27	577,46	100,00	0,00
Transfer		5.112.625,21	100,00	-99,51	20.369,32
Belanja Negara	7.062.565,84	2.815.043,68	4.716.855,01	-21,48	6.007.005,69
Belanja Pemerintah	1.779.613,04	2.764.733,74	4.544.346,78	7,46	4.228.894,19
Transfer	5.282.952,80	50.309,94	172.508,23	-90,30	1.778.111,50
Surplus(Defisit)	(5.448.053,80)	2.790.930,55	(2.657.123,26)	-223,91	2.144.379,07
Pembiayaan		12.324,27	12.324,27	-91,03	137.319,41
Penerimaan Pembiayaan Daerah		98.626,45	98.626,45	-35,20	152.191,19
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		86.302,18	86.302,18	480,31	14.871,78
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(5.448.053,80)	2.803.254,81	(2.644.798,99)	-215,10	2.297.782,78

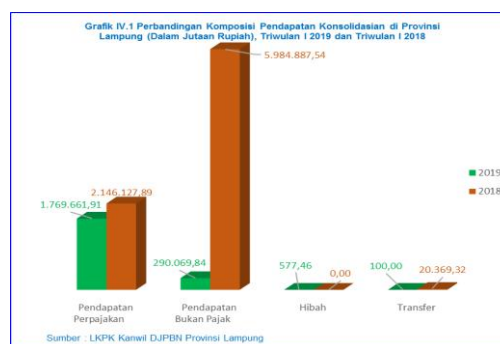
Sumber: LKPK-TW Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2019 (Per 10 Mei 2019)

B. Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

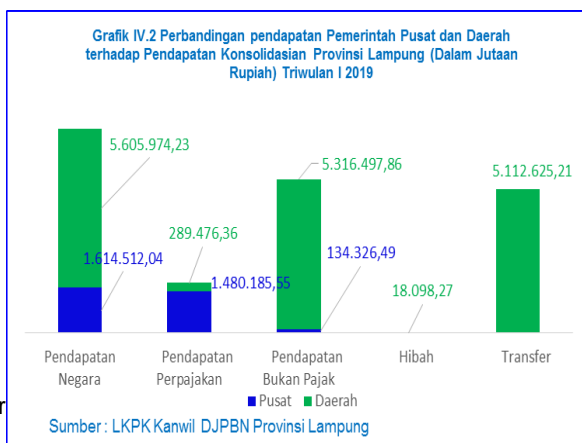
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik VI.1. Pendapatan Konsolidasian triwulan I 2019 adalah Rp2,059 triliun yang meliputi Pendapatan Perpajakan Rp1,769 triliun, Pendapatan Bukan Pajak Rp290,069 milyar, Pendapatan Hibah Rp577,46 milyar, dan Pendapatan Transfer Rp100,00 milyar.





Rp577,46 juta dan Pendapatan Transfer Rp100 juta. Pendapatan Konsolidasian triwulan I 2019 menurun 17,54% dibandingkan dengan triwulan I 2018. Total pendapatan perpajakan konsolidasian triwulan I 2019 turun 74,73% dibandingkan dengan triwulan I 2018.

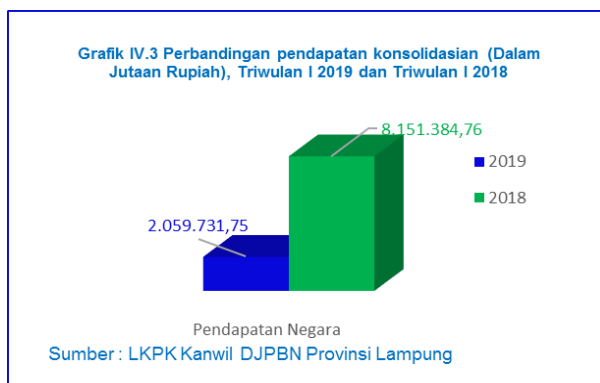


Sumber

Grafik IV.2 terlihat bahwa pendapatan perpajakan pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun sedangkan untuk pemerintah daerah sebesar Rp289,4 miliar, namun untuk pendapatan Bukan Pajak pemerintah daerah cukup besar sebesar Rp5,3 triliun

dibandingkan dengan pemerintah pusat yang hanya sebesar Rp134,3 milyar. Dari Total pendapatan triwulan I 2019 terlihat bahwa pendapatan daerah provinsi lampung sebesar Rp5,6 triliun lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun.

2. Analisis Perubahan



Total pendapatan konsolidasian triwulan I 2019 menurun 74,73% dibandingkan dengan triwulan I 2018. Penurunan tersebut terjadi akibat rendahnya penerimaan pendapatan bukan pajak yang hanya

mencapai Rp290 milyar dibandingkan dengan triwulan I 2018 sebesar Rp5,9 triliun (turun 95,15% dibandingkan dengan triwulan I 2018).

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian.

PDRB Provinsi Lampung Triwulan I tahun 2019 terealisasi sebesar Rp87,19 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,18%, sedangkan tahun 2018 terealisasi Rp80,30 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,16%.



Tabel IV.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2018		2019	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	2.146.127,89	15,68%	1.769.661,91	-17,54%
PNBP	5.984.887,54	1597,92%	290.069,84	-95,15%
Total	8.131.015,43		2.059.731,75	
PDRB/Pertu. Ekonomi	80,30T	5,16%	87,19T	5,18%

Sumber : BPS Lampung dan LKPK Kanwil DJPB Lampung

Berdasarkan data tersebut, di Provinsi Lampung terjadi penurunan penerimaan perpajakan dan PNBP namun disisi lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat di triwulan I 2019 sebesar 5,18% atau sebesar 87,19 triliun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan konsumsi rumah tangga yaitu pada volume konsumsi bahan makanan, pakaian, komunikasi, pendidikan dan perawatan kesehatan. Sedangkan untuk Konsumsi LNPRT meningkat disebabkan aktifitas kampanye Capres dan Caleg. Namun penguatan tersebut belum secara optimal meningkatkan pertumbuhan penerimaan perpajakan dan PNBP di Provinsi Lampung. Secara umum idealnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian.

C. Belanja Konsolidasian

Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Analisis terhadap Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah antara lain :

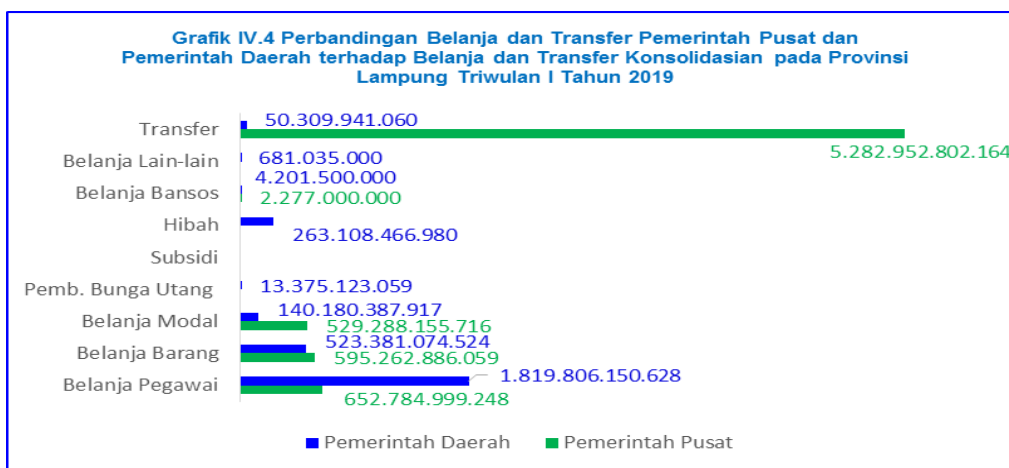
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).

Secara agregat belanja dan transfer konsolidasian triwulan I 2019 menurun 21,48% dibanding dengan periode triwulan I 2018

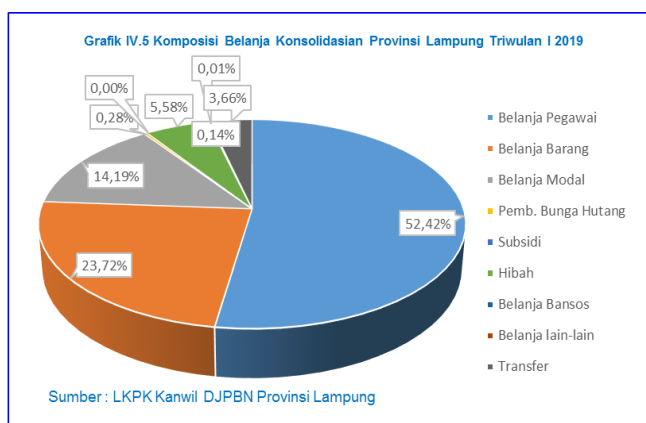


Berdasarkan jenis belanja Konsolidasian belanja operasional masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2,4 triliun terjadi kenaikan 7,21% dibanding triwulan I 2018 dan belanja barang sebesar Rp1,1 triliun dengan kenaikan 19,83% dibandingkan triwulan I 2018. Sedangkan porsi belanja



modal jumlahnya lebih kecil dibanding dengan porsi belanja pegawai dan belanja barang yaitu sebesar Rp669,4 miliar namun terjadi kenaikan 19,74% dibandingkan dengan triwulan I 2018. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung maka belanja/pengeluaran lebih difokuskan pada jenis program atau kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian (stimulus ekonomi).

2. Analisis Perubahan

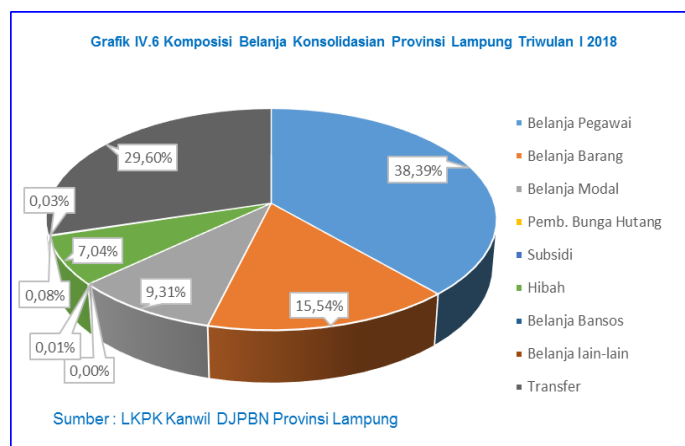


Grafik IV.5 terlihat bahwa komposisi belanja konsolidasian untuk triwulan I tahun 2019 didominasi belanja pegawai sebesar Rp2,4 triliun atau 52,42% dan belanja barang sebesar Rp1,1 triliun atau 23,72%

selanjutnya belanja modal sebesar Rp669,4 miliar atau 14,19% dari porsi belanja konsolidasian pada triwulan I tahun 2019.



KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I TAHUN 2019



Grafik IV.6 terlihat bahwa belanja konsolidasian untuk triwulan I tahun 2018 tetap didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2.3 triliun atau 38.39% dan belanja barang Rp933,5

miliar atau 15,54% selanjutnya belanja modal sebesar Rp559 milyar atau 9.31% dari porsi belanja konsolidasian. Jika dibandingkan antara belanja konsolidasian triwulan I 2019 terhadap triwulan I 2018 terjadi kenaikan belanja sebesar Rp315,4 miliar atau 7,4%.

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL

Gambar IV.1 Laporan Statistik Keuangan Tingkat Wilayah Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2019

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan netto	
Pendapatan	2.073.501.864.899
a. Pajak	2.059.731.754.745
b. Kontribusi sosial	
c. Hibah	577.460.000
d. Pendapatan lain	13.192.650.154
Beban	3.874.878.235.498
a. Kompensasi pegawai	2.472.591.149.876
b. Penggunaan barang dan jasa	1.118.643.960.583
c. Konsumsi aset tetap	
d. Bunga	13.375.123.059
e. Subsidi	
f. Hibah	263.108.466.980
g. Manfaat sosial	6.478.500.000
h. Beban lainnya	681.035.000
Keseimbangan operasi bruto/neto	-1.801.376.370.599
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	
a. Aset tetap	669.468.543.633
b. Persediaan	
c. Barang berharga	
d. Aset nonproduksi	
Net Lending/Borrowing	-1.131.907.826.966
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	-1.119.583.560.848
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	98.626.445.333
- Domestik	98.626.445.333
- Luar Negeri	
b. Keterjadian Kewajiban	86.302.179.215
- Domestik	86.302.179.215
- Luar Negeri	

Sumber: LKPK Kanwil DJPBN Provinsi Lampung

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Triwulan I 2019, Pendapatan mencapai Rp.2,07 triliun, dan beban mencapai Rp3,8 triliun. Saldo Operasi Bruto/Neto (*Gross/Net Operating Balance*) sebesar minus Rp.1,8 triliun, yang setelah dikurangi dengan akuisisi aset non keuangan neto menghasilkan angka Pinjaman neto (*net lending/borrowing*) sebesar minus Rp.1,1 triliun. Pada Triwulan I 2019 PDRB Lampung sebesar 5,18% atau Rp87,19

triliun. Dengan rasio belanja pemerintah

terhadap PDRB Provinsi Lampung sebesar 4,44% dan rasio dari sisi investasi terhadap PDRB sebesar 0,03% menurun dibandingkan pada triwulan I 2018. Padahal disisi lain PDRB triwulan I 2019 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lampung.



BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk Memajukan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Provinsi Lampung

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang memiliki peran vital bagi masyarakat. Modal usaha yang relatif kecil dengan pengelolaan yang sederhana menjadikan usaha jenis ini mendominasi usaha masyarakat. Oleh karenanya, UMK menjadi motor dalam perekonomian nasional terutama sebagai wadah usaha bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengembangan kewirausahaan dan inovasi bisnis di Indonesia. Menurut *Center for Information and Development Studies (CIDES)* UMK tidak terlalu terpengaruh krisis ekonomi global karena keunggulannya yang memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan keunggulan ini, UMK tetap kokoh bertahan saat terjadi gejolak ekonomi global yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional.

Tabel 5.1 Jumlah UMK dan Presentase UMK di Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Lampung, 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (dari keseluruhan di Lampung)	Presentase UMK di setiap Kab/Kota
1	Lampung Barat	24,266	3.15	99.4
2	Tanggamus	50,012	6.49	99.69
3	Lampung Selatan	81,981	10.64	99.31
4	Lampung Timur	110,709	14.37	99.61
5	Lampung Tengah	114,403	14.85	99.41
6	Lampung Utara	54,102	7.02	99.45
7	Way Kanan	35,454	4.6	99.72
8	Tulangbawang	33,529	4.35	98.93
9	Pesawaran	40,686	5.28	99.71
10	Pringsewu	39,715	5.15	99.26
11	Mesuji	16,417	2.13	99.36
12	Tulang Bawang Barat	20,836	2.7	99.4
13	Pesisir Barat	10,575	1.37	99.51
14	Bandar Lampung	114,809	14.9	97.82
15	Metro	23,138	3	98.18
	Provinsi Lampung	770,632	100	99.17

Sumber: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Lampung, BPS Lampung

Demikian pula di Lampung, UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Hasil Survey Ekonomi 2016 Lanjutan (SE2016-Lanjutan) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Lampung terdapat lebih dari 770 ribu UMK



di Lampung atau 99,17 persen dari total usaha nonpertanian. UMK tersebar diseluruh Kabupaten/Kota dengan presentase terbesar di Kota Bandar Lampung (14,90 persen), Lampung Tengah (14,85 persen), dan Lampung Timur (14,62 persen). Usaha ini juga menyerap tenaga kerja lebih dari 1,67 juta orang atau sekitar 87,81 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Lampung. Lebih rinci lagi, penyerapan tenaga kerja paling banyak pada lapangan usaha perdagangan yang mencapai 47,62 persen, disusul industri pengolahan dengan 12,98 persen dan kaegori Pendidikan dan Akomodasi Makan Minum masing-masing sebesar 12,26 persen dan 10,59 persen. Secara umum, UMK di Provinsi Lampung menyerap 2 tenaga kerja per usaha dengan sektor pendidikan mampu menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu rata-rata 11 pekerja per usaha.

Tabel 5.2 Jumlah UMK, Jumlah tenaga Kerja, dan rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Non Pertanian Menurut Kategori di Provinsi Lampung, 2017

No	Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
1	Pertambangan dan Penggalian	1,154	3,985	3
2	Industri Pengolahan	88,799	217,186	2
3	Pengadaan listrik gas/uap air dan udara dingin	988	1,438	1
4	Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	1,874	3,011	2
5	Konstruksi	7,894	49,955	6
6	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	443,460	796,454	2
7	Pengangkutan dan perdagangan	28,648	39,817	1
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	94,429	177,177	2
9	Informasi dan komunikasi	22,600	34,786	2
10	Aktivitas keuangan dan asuransi	2,378	8,186	3
11	Real estat	7,887	9,816	1
12	Jasa perusahaan	11,140	32,318	3
13	Pendidikan	18,369	205,096	11
14	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	7,892	31,151	4
15	Aktivitas jasa lainnya	33,120	62,276	2
	Total	770,632	1,672,652	2

Sumber: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Lampung, BPS Lampung

Berdasarkan data yang dihimpun dari SE2016-Lanjutan juga diketahui omset UKM di Provinsi Lampung mencapai lebih dari Rp141,69 triliun. Tahun 2018, sumber utama pertumbuhan ekonomi Lampung yang sebesar 5,25 persen (c-to-c) adalah industri

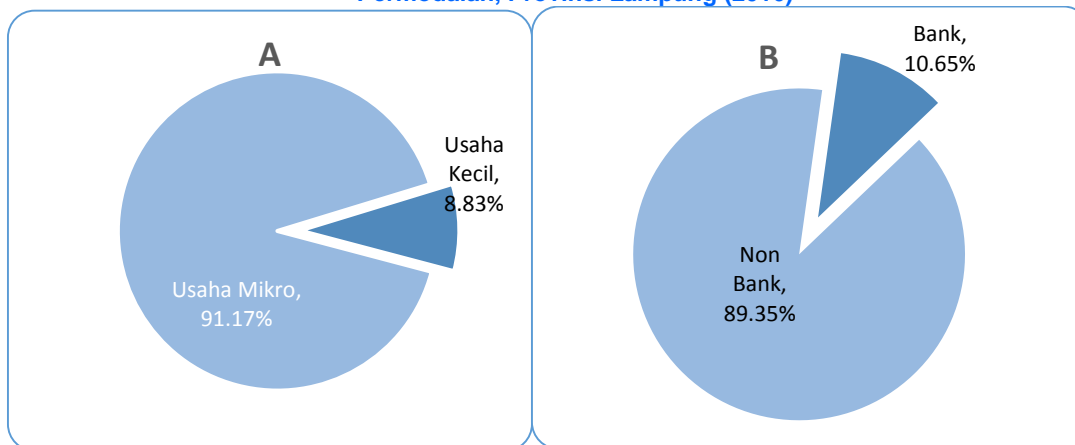


pengolahan dan perdagangan dengan kontribusi masing-masing 1,63 persen dan 0,82 persen. Kedua lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha mayoritas pelaku UMK di Lampung dimana jumlah UMK sektor perdagangan mencapai 57,54 persen.

Meskipun perannya cukup besar dalam perekonomian, UMK masih mengalami beberapa hambatan untuk dapat berkembang. Menurut SE2016-Lanjutan, permodalan menjadi kendala utamanya. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, UMK bertumpu pada modal sendiri karena sulitnya akses terhadap perbankan (*non-bankable*).

Pemerintah sebenarnya telah menggulirkan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM. Pertama, menerbitkan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan bank umum mencapai rasio kredit UMKM minimal 20 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana permodalan bagi UMKM melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di tahun 2018, pemerintah telah menganggarkan 120 triliun dana KUR dengan realisasi mencapai Rp.96,72 triliun atau 87,9 persen. Kebijakan ini juga terus diperbarui dengan menurunkan suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen per tahun.

Grafik 5.1 (A) Presentase UMK Non Pertanian Menurut Skala Usaha Provinsi Lampung, 2016
(B) Presentase UMK yang Tidak Mempunyai Akses ke Bank dan LKBB menurut Akses terhadap Permodalan, Provinsi Lampung (2016)



Sumber: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Lampung, BPS Lampung

Namun skema KUR belum cukup menjangkau usaha mikro yang justru mendominasi usaha yang *non-bankable*. Hal ini diantaranya karena syarat agunan fisik dan atau legalitas usahanya. Perbankan sulit menilai risiko dan kelayakan menerima kredit karena UMKM kurang memperhatikan prinsip pembukuan dan pencatatan keuangan yang baik. Pengelolaan UMK yang sederhana terungkap dalam SE-2016 Lanjutan dimana 90 persen UMK di Lampung tidak memiliki badan hukum dan belum memanfaatkan teknologi (komputer dan internet). Dari jumlah UMK di Lampung, 91,17



persen-nya merupakan usaha mikro yang membutuhkan modal usaha lebih rendah dibanding usaha kecil yang dibiayai KUR (kurang dari Rp.25 juta). Untuk menyasar usaha mikro tersebut, pemerintah menggulirkan kredit Utra Mikro (UMi) khusus untuk segmen usaha mikro dengan plafon kredit sampai dengan Rp.10 juta melalui skema dana bergulir.

Lebih lanjut terungkap pula dari SE2016-Lanjutan, latar belakang pendidikan para pengusaha UMK di Lampung sebagian besar masih rendah. Pengusaha UMK berpendidikan SD kebawah mencapai 33,71 persen. Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, mereka cenderung menjalankan usaha berdasarkan naluri sehingga sulit memenangi persaingan yang pada gilirannya meningkatkan risiko kegagalan dalam menjalankan usaha. Oleh karenanya pendampingan bagi pelaku UKM dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan serta mengembangkan usaha tersebut. Hal ini diakomodir dalam skema UMi dimana penyalur diwajibkan menyediakan pendampingan bagi debitur UMi, baik terkait pengembangan usaha maupun peningkatan kualitas hidup debitur.

Pelaku UKM dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur UMi di Lampung antusias dengan adanya skema ini. Pemerintah Daerah juga menunjukkan dukungan karena menyadari pentingnya UMi untuk mengentaskan kemiskinan di Lampung. Berdasarkan data dari aplikasi SIKP sampai dengan 8 Mei 2019 tercatat 6.840 debitur telah memperoleh pembiayaan UMi dengan nilai akad mencapai Rp.32,175 milyar. Tren penyaluran UMi di Lampung juga semakin meningkat. Dengan pembiayaan UMi diharapkan memperluas kesempatan usaha masyarakat sehingga dapat meingkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung. Kemudahan akses permodalan melalui UMi juga diharapkan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan di Provinsi Lampung yang saat ini berada dikisaran 1,92 persen dari total jumlah penduduk, masih dibawah standar internasional yaitu 2 persen.

Tabel 5.3 Total Akad Pembiayaan UMi di Provinsi Lampung, Januari-Mei 2019

No.	Bulan	Total Akad
1	Januari	Rp2,412,500,000.00
2	Februari	Rp4,357,171,000.00
3	Maret	Rp14,226,806,000.00
4	April	Rp10,749,853,000.00
5	Mei*	Rp426,000,000.00
		Rp32,172,330,000.00

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) s.d 8 Mei 2019



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

JALAN CUT MUTIA NO. 23A BANDAR LAMPUNG
TELEPON (0721) 487423, 484957, 471308; FAKSIMILE (0721) 487401
SITUS www.perbendaharaan.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND - 786/WPB.08/BD.0302/2019

Yth : Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari : Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
Sifat : Sangat segera
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2019
Kanwil DJPb Provinsi Lampung.
Tanggal : Mei 2019

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2019 Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Alfiker Siringingo